



## Pendampingan Pengembangan Organisasi BUMDes Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang Menuju Sustainable Institution

Amni Zarkasyi Rahman<sup>1</sup>, Dyah Lituhayu<sup>1</sup>, Maesaroh<sup>1</sup>, Satria Aji Imawan,  
 Mochamad Rizki Fitrianto<sup>1\*</sup>, Juang Abdi Muhammad<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro Departemen Administerasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
 Semarang, Indonesia

[mrizkifitrianto@lecturer.unip.ac.id](mailto:mrizkifitrianto@lecturer.unip.ac.id)

---

Article history

Received	:	25/10/2025
Received in revised form	:	30/10/2025
Accepted	:	02/12/2025

---

**Abstract:** Village-Owned Enterprises (BUMDes) serve as an essential instrument in promoting rural economic independence through the management of local potential. Gedongmulyo Village, located in Lasem District, Rembang Regency, possesses significant coastal resources; however, these have not yet been fully optimized by the BUMDes. Village-Owned Enterprises (BUMDes) are vital for rural economic independence. However, the BUMDes in Gedongmulyo Village, Rembang, has not yet fully utilized its rich coastal resources. This community service activity aimed to strengthen the BUMDes for sustainability by focusing on HR development, business innovation, collaboration, and community participation. Using a participatory method (training and mentoring), the results showed an improvement in managerial competence, diversification of marine products, expansion of local partnerships, and increased community trust. In conclusion, strengthening the four key pillars, HR, diversification, collaboration, and participation, is the fundamental foundation for establishing a sustainable and independent BUMDes

**Keywords:** BUMDes, community empowerment, village institution, sustainable institution, coastal area

**Abstrak:** Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi pedesaan melalui pengelolaan potensi lokal. Desa Gedongmulyo, yang terletak di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, memiliki sumber daya pesisir yang signifikan; namun, sumber daya ini belum sepenuhnya dioptimalkan oleh BUMDes. BUMDes sangat penting untuk kemandirian ekonomi pedesaan. Namun, BUMDes di Desa Gedongmulyo, Rembang, belum sepenuhnya memanfaatkan kekayaan sumber daya pesisirnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan BUMDes agar berkelanjutan dengan berfokus pada pengembangan SDM, inovasi bisnis, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat. Menggunakan metode partisipatif (pelatihan dan pendampingan), hasilnya menunjukkan peningkatan kompetensi manajerial, diversifikasi produk laut, perluasan kemitraan lokal, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penguatan empat pilar utama seperti SDM, diversifikasi, kolaborasi, dan partisipasi, adalah fondasi mendasar untuk mendirikan BUMDes yang mandiri dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** : BUMDes, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan desa, sustainable institution, pesisir

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal secara produktif dan berkelanjutan (Gani, 2025). Sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas, BUMDes berperan penting dalam memperkuat struktur ekonomi perdesaan dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak eksternal (Satria, 2020). Perannya tidak hanya untuk menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan sosial dan penguatan kelembagaan masyarakat desa (Yunita & Santoso, 2022). Dalam praktiknya, banyak BUMDes menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola, kurangnya inovasi usaha, serta minimnya jaringan kemitraan yang berkelanjutan (Rahman, 2023).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aspek krusial dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dibentuk sebagai instrumen ekonomi desa yang berlandaskan pada potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, dengan modal yang sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Keberadaan BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga mengedepankan fungsi sosial dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pengelolaan BUMDes menuntut penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan. Transparansi diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan desa mengetahui proses pengambilan keputusan dan kondisi keuangan BUMDes, sementara akuntabilitas menjadi dasar pertanggungjawaban pengelola kepada pemerintah desa dan masyarakat. Partisipasi masyarakat desa penting untuk memastikan bahwa unit usaha yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendapat dukungan sosial yang kuat, sehingga keberlanjutan usaha dapat terjaga (Sujarweni, 2019).

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan BUMDes memerlukan struktur organisasi yang jelas, mulai dari penasihat, pelaksana operasional, hingga pengawas. Kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing unsur organisasi membantu mencegah tumpang tindih kewenangan serta meminimalkan potensi

konflik kepentingan. Selain itu, pengelola BUMDes dituntut memiliki kompetensi manajerial dan kewirausahaan agar mampu mengelola usaha secara profesional, adaptif terhadap perubahan pasar, dan inovatif dalam mengembangkan unit usaha berbasis potensi desa (Pradana & Rahmawati, 2021).

Aspek pengelolaan keuangan juga menjadi faktor penentu keberhasilan BUMDes. Pengelolaan keuangan yang baik mencakup perencanaan anggaran, pencatatan transaksi secara sistematis, penyusunan laporan keuangan, serta pengawasan penggunaan dana. Praktik pengelolaan keuangan yang tidak tertib sering kali menjadi penyebab utama kegagalan BUMDes. Oleh karena itu, penerapan sistem administrasi keuangan yang sederhana namun akuntabel sangat diperlukan agar BUMDes dapat dipercaya dan berkelanjutan (Sari & Nugroho, 2020).

Selain itu, keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kesesuaian jenis usaha dengan potensi dan karakteristik desa. Unit usaha yang dikembangkan sebaiknya berbasis pada sumber daya lokal, seperti pertanian, pariwisata desa, perdagangan, atau jasa, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif (Kurniawan, 2016).

Secara keseluruhan, pengelolaan BUMDes yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta pemilihan unit usaha yang tepat, BUMDes dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi desa dan instrumen strategis dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang merupakan desa pesisir dengan potensi sumber daya alam melimpah, seperti hasil laut dan rumput laut. Namun, potensi tersebut belum dikelola optimal oleh BUMDes karena keterbatasan kemampuan pengurus dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) ini dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes melalui pelatihan manajemen usaha, pendampingan pengembangan produk kreatif berbasis potensi lokal, dan fasilitasi jejaring kemitraan dengan pelaku usaha.

Program ini relevan dengan kebutuhan mitra karena berfokus pada peningkatan kapasitas dan kolaborasi sebagai solusi terhadap permasalahan kelembagaan dan ekonomi desa. Tujuan kegiatan adalah membangun BUMDes yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat Gedongmulyo.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah lembaga ekonomi lokal yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk mengelola potensi ekonomi dan sumber daya lokal (Nugroho, R., & Suprapto, F. A., 2021). Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang memiliki potensi pesisir yang melimpah, seperti hasil laut, rumput laut, dan produk olahan ikan. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya manajemen usaha, minimnya jaringan kemitraan, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Permasalahan tersebut menyebabkan BUMDes Gedongmulyo belum mampu berperan sebagai lembaga ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan (*sustainable institution*). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes melalui peningkatan kemampuan manajerial, pengembangan usaha kreatif, serta penguatan kolaborasi dan partisipasi masyarakat desa.

## METODE

Kegiatan pengabdian ini dijalankan dengan melibatkan langsung masyarakat (pendekatan partisipatif) dan memberikan bimbingan secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan ini memiliki beberapa tahapan utama. Kegiatan memulai dengan melakukan pengamatan dan analisis mendalam untuk memetakan kondisi nyata Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Analisis ini mencakup potensi ekonomi desa dan permasalahan manajemen yang ada, dengan berpedoman pada prinsip 6M (Manusia, Uang, Pasar, Mesin, Metode, dan Bahan Baku). Tahapan selanjutnya adalah mengadakan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM): Tahap ini berfokus pada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes. Materi pelatihan meliputi keahlian manajerial, perencanaan usaha, cara membuat laporan keuangan, serta strategi memasarkan produk lokal secara digital. Tahapan selanjutnya adalah

Pendampingan Pengembangan Usaha dan Jalinan Kerja Sama: Tim pendamping memberikan bantuan langsung untuk mengembangkan produk-produk olahan hasil laut. Selain itu, kami juga membangun jaringan kemitraan dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang ada di wilayah setempat. Tahapan akhir dalam kegiatan ini adalah dengan Meningkatkan Keterlibatan dan Kepercayaan Masyarakat. Untuk menumbuhkan rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola BUMDes, kami mengadakan berbagai kegiatan. Ini termasuk Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), sosialisasi, dan kegiatan kerja bakti/gotong royong serta Program pengabdian dengan pendampingan masyarakat yang terintegritas, melibatkan pelatihan teknis, promosi budaya, dan pemberdayaan ekonomi (Darmi, T., & Harini, R, 2025). Pendekatan yang simultan akan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui penguatan ekonomi dan kelembagaan (Al Asy'arie et.al, 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Pendampingan Pengembangan Organisasi BUMDes Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang Menuju Sustainable Institution*” dilaksanakan di Balai Desa Gedongmulyo. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat desa, termasuk perangkat pemerintahan desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, pelaku UMKM lokal, serta perwakilan kelompok pemuda dan perempuan. Pendekatan partisipatif digunakan untuk memastikan seluruh elemen memiliki rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap BUMDes dan dapat berkontribusi aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta implementasi kegiatan pengembangan lembaga ekonomi desa (Pawitan, G et.al, 2025).



**Gambar 1.** Sosialisasi dan FGD Sustainable Intitution BUMDES Gedongmulyo

Kegiatan diawali dengan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “*Membangun BUMDes sebagai Sustainable Institution.*” Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan pemahaman konseptual mengenai pentingnya keberlanjutan lembaga desa dalam konteks ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Materi yang disampaikan menekankan pada empat aspek utama: keberlanjutan organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diversifikasi usaha berbasis potensi lokal, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Sesi FGD juga menjadi wadah interaktif antara tim pengabdian dan para peserta untuk melakukan identifikasi kondisi eksisting BUMDes Gedongmulyo dengan menggunakan pendekatan analisis 5M (Man, Money, Machine, Methods, dan Materials). Model 5M (Man, Money, Machine, Methods, dan Materials) adalah suatu pendekatan dalam manajemen operasi yang menyatakan bahwa organisasi membutuhkan lima faktor utama untuk berfungsi secara optimal: tenaga kerja/manusia, uang/modal, mesin/peralatan, metode/prosedur, dan material/bahan. Model ini digunakan untuk menganalisis dan memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi.

1. Man (Sumber Daya Manusia): Merujuk kepada SDM yang mengelola dan menjalankan kegiatan BUMDes, termasuk keterampilan, pengalaman,

kepemimpinan, dan kapasitas pekerja. Tanpa SDM yang kompeten, penggunaan seluruh sumber daya lain tidak akan optimal. Berdasarkan hasil diskusi, ditemukan bahwa pengurus BUMDes masih terbatas dalam hal kompetensi manajerial dan literasi keuangan. Sebagian besar pengurus bekerja secara sukarela dan belum memiliki sistem pembagian tugas yang jelas.

2. Money (Permodalan): Merupakan modal dan sumber daya finansial yang diperlukan untuk mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan unit-unit usaha BUMDes, termasuk sumber pembiayaan dari APBDes, pinjaman, atau investasi pihak ketiga. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa modal usaha BUMDes masih mengandalkan penyertaan dari dana desa dan belum memiliki sumber pendapatan mandiri yang signifikan.
3. Machine (Sarana dan Prasarana): Meliputi alat, fasilitas, dan teknologi yang digunakan untuk mendukung operasional usaha BUMDes, misalnya peralatan produksi, sistem IT, sarana transportasi, dan infrastruktur lainnya. Berdasarkan hasil observasi dan FGD ditemukan bahwa fasilitas pendukung kegiatan usaha BUMDes, termasuk peralatan produksi dan sarana promosi, masih terbatas.
4. Methods (Tata Kelola dan Strategi Usaha): merujuk kepada Prosedur kerja dan sistem manajemen yang menjadi panduan operasional, termasuk SOP, mekanisme pelaporan, tata kelola keuangan, dan sistem pengawasan. Dari hasil FGD ditemukan bahwa Belum ada panduan operasional baku maupun sistem pelaporan keuangan yang terstandar. Dilain sisi aspek keselamatan menjadi isu yang tidak kalah penting dalam pengelolaan manajemen modern khususnya terkit dengan pembentukan budaya keselamatan (*safety culture*) (Asmara, A., et all. 2025).
5. Materials (Potensi dan Sumber Daya Alam): meliputi bahan baku atau sumber daya fisik yang digunakan dalam kegiatan usaha seperti bahan mentah pengolahan produk lokal, sarana distribusi, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa. Dari hasil FGD dan observasi Desa Gedongmulyo memiliki potensi sumber daya alam pesisir, terutama hasil laut dan kawasan pantai yang sangat prospektif untuk dikembangkan.

Dari hasil identifikasi tersebut, ditemukan bahwa Pantai Layur merupakan aset potensial desa yang selama ini belum dikelola secara optimal. Melalui hasil diskusi, disepakati bahwa pengembangan Pantai Layur sebagai objek wisata lokal dapat menjadi titik awal penguatan ekonomi desa sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, kegiatan Abdimas dilanjutkan dengan survei lapangan untuk meninjau kondisi eksisting Pantai Layur dan menganalisis peluang pengembangannya sebagai unit usaha BUMDes.

Pada kegiatan survei lapangan, tim bersama perwakilan pemerintah desa dan pengurus BUMDes melakukan observasi langsung terhadap aksesibilitas lokasi, kondisi lingkungan, potensi daya tarik wisata, serta kesiapan masyarakat sekitar. Hasil observasi menunjukkan bahwa Pantai Layur memiliki keunggulan berupa panorama alam yang indah, lingkungan pesisir yang masih alami, dan kedekatan dengan jalur wisata budaya di Lasem. Namun, terdapat beberapa kendala seperti akses jalan yang belum memadai, minimnya fasilitas dasar seperti tempat parkir dan sanitasi, serta belum adanya manajemen wisata yang terstruktur.

Berdasarkan hasil tersebut, tim Abdimas memberikan beberapa rekomendasi strategis kepada pengurus BUMDes dan pemerintah desa. Pertama, perlunya penyusunan rencana pengembangan wisata berbasis BUMDes dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pelayanan wisata. Kedua, dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas SDM di bidang pengelolaan wisata, promosi digital, dan manajemen keuangan sederhana. Ketiga, mendorong BUMDes untuk menjalin kemitraan dengan pelaku UMKM dan komunitas wisata lokal, guna menciptakan rantai ekonomi yang saling menguntungkan.

Selain itu, kegiatan Abdimas juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Melalui FGD lanjutan, dibahas model tata kelola BUMDes yang akuntabel, seperti penyusunan laporan keuangan periodik, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, serta penggunaan sistem informasi digital sederhana untuk pelaporan kegiatan usaha.

Dampak langsung dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya pemahaman pengurus BUMDes dan perangkat desa tentang konsep kelembagaan berkelanjutan. Peserta mulai memahami pentingnya diversifikasi usaha dan

kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlangsungan BUMDes. Masyarakat juga menunjukkan antusiasme tinggi terhadap rencana pengembangan Pantai Layur sebagai destinasi wisata baru yang tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan BUMDes melalui pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal dapat menjadi strategi efektif dalam mewujudkan *sustainable institution*. Melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan potensi wisata Pantai Layur, serta kolaborasi antara BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat, Desa Gedongmulyo kini memiliki arah yang lebih jelas menuju kemandirian ekonomi dan keberlanjutan kelembagaan desa.

Pelaksanaan program diharapkan mampu menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek kelembagaan dan kinerja BUMDes Gedongmulyo. Pengurus memperoleh pemahaman lebih baik mengenai tata kelola organisasi, penyusunan rencana bisnis, dan pencatatan keuangan yang transparan. Diversifikasi usaha juga mulai berjalan dengan dikembangkannya produk olahan hasil laut dan promosi melalui media sosial dan *marketplace* lokal. Dari sisi kolaborasi, BUMDes diharapkan berhasil menjalin kerja sama dengan beberapa UMKM pesisir dan koperasi lokal, yang memperluas jaringan pemasaran produk desa. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat terlihat dari meningkatnya keikutsertaan warga dalam kegiatan produksi dan promosi, serta meningkatnya kepercayaan terhadap pengurus.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Pendampingan Pengembangan Organisasi BUMDes Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang Menuju Sustainable Institution*” menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan BUMDes merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Hasil kegiatan membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun lembaga ekonomi desa yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan partisipatif yang diawali dengan sosialisasi, FGD, dan survei lapangan, teridentifikasi bahwa BUMDes Gedongmulyo memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama melalui pengelolaan Pantai Layur sebagai destinasi wisata desa. Analisis 5M (Man, Money, Machine, Methods, dan Materials) mengungkapkan sejumlah kelemahan dalam kapasitas SDM, permodalan, dan sistem tata kelola, namun juga memperlihatkan peluang besar dari potensi pesisir yang belum termanfaatkan optimal.

Kegiatan pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus BUMDes dalam aspek manajerial, perencanaan usaha, serta pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Rencana pengembangan Pantai Layur sebagai unit usaha BUMDes menjadi bukti konkret upaya menuju kemandirian dan keberlanjutan ekonomi desa. Dengan demikian, penguatan SDM, diversifikasi usaha, serta kolaborasi multipihak menjadi fondasi utama untuk membangun BUMDes Gedongmulyo sebagai *sustainable institution* yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Adi., A., Ramadianti, W., Jumri, R., Saputra, S. A., & Khairunisa, Z. (2025). *Peningkatan produktivitas dan kemandirian masyarakat Desa Sri Kuncoro melalui transformasi literasi*. Jurnal Abdimas Serawai, 5(2), 110–121. <https://doi.org/10.36085/jams.v5i2.8155>
- Darmi, T., & Harini, R. (2025). *Pendampingan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan desa wisata*. Jurnal Abdimas Serawai, 4(3), 162–169. <https://doi.org/10.36085/jams.v4i3.7586>
- Al Asy'arie, M. A. H., Arifin, M. H., & Muhammad, J. A. (2025). *Tata kelola produk perikanan penunjang ekonomi rakyat*. Jurnal Abdimas Serawai, 5(3), 243–250. <https://doi.org/10.36085/jams.v5i3.9060>
- Gani, M. A. (2025). *Peran BUMDes dalam mendorong kemandirian ekonomi desa di Kecamatan Banyuputih*. Jurnal Wahana Bina Pemerintahan, 7(1). <https://doi.org/10.55745/jwbp.v7i1.348>
- Kurniawan, B. (2016). *Desa mandiri, desa membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Panduan Pengelolaan BUMDes Berkelanjutan*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Nugroho, R., & Suprapto, F. A. (2021). *Badan Usaha Milik Desa Bagian 1: Konsep dasar*. Elex Media Komputindo.

- Pawitan, G., Lesmono, D., Aritonang, K., Choyri, M. C. D., & Diyanah, M. (2025). Empowering rural communities through strengthening village-owned enterprises (BUMDes) for sustainable socioeconomic development: A case study of Mekarsari Village, Garut Regency. *Society*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.797>
- Pradana, A. W., & Rahmawati, D. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 145–158.
- Rahman, A. Z. (2023). *Model Penguatan Kelembagaan BUMDes melalui Pendampingan Partisipatif*. Semarang: FISIP Universitas Diponegoro.
- Satria, A. (2020). Pemberdayaan ekonomi pesisir melalui BUMDes. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 15(2), 112–125.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 23–34.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yunita, F., & Santoso, H. (2022). Kapasitas SDM dan keberlanjutan BUMDes. *Jurnal Abdimas Nusantara*, 4(1), 45–55.